BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Pendidikan merupakan proses yang panjang dalam kehidupan setiap individu untuk mengembangkan kapasitas diri, baik dalam hal kecerdasan, pengendalian diri, pembentukan akhlak mulia, hingga keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Nasution dkk., 2022). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menginisiasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dengan tujuan utama untuk memastikan semua peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, dengan memberikan pembelajaran remedial yang berkelanjutan bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan. Dengan kata lain, SKTB bertujuan untuk mencegah siswa tinggal kelas dan memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran.

Agar pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan ini berhasil dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti melakukan kegiatan bimbingan teknis, menyusun standar remedial bagi guru yang mencakup beberapa kebutuhan siswa, dan melaksanakan sosialisasi dua arah.

B. Pendahuluan

Dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dimana menurut Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan, tetapi juga pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menangani masalah pendidikan di daerah mereka.

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan merupakan pendekatan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip pembelajaran tuntas dan berkesinambungan dengan proses belajar siswa tanpa hambatan administratif seperti tinggal kelas. Dalam sistem ini, seluruh siswa dipastikan naik kelas setiap tahun ajaran, dengan catatan bahwa sekolah wajib menyediakan program remedial bagi siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kebijakan SKTB dilaksanakan pada tahun 2013 disemua sekolah tingkatan SD dan SMP di Kabupaten Gowa. Hal tersebut, menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gowa mencapai 156.098 total penduduk, dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-15) tahun yang cukup besar, yaitu 23.000 anak. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan angka kelulusan tingkat SD dan SMP di Kecamatan Somba Opu mencapai hampir 100% pada tahun ajaran 2023/2024, yang tidak sejalan dengan capaian kemampuan literasi murid. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa 53,42% siswa SD dan 40% siswa SMP di Kecamatan Somba Opu berada di bawah level minimum dalam literasi membaca dan lebih dari 55% siswa tingkat SD dan SMP mengalami kesulitan dalam numerisasi dasar. Hal tersebut menunjukkan adanya *GAP* yang cukup besar antara presentasi kelulusan dengan capaian akademik riil siswa di Kecamatan Somba Opu.

C. Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kecamatan Somba Opu.

1. Pemahaman Guru Terhadap Teknis Pelaksanaan Belum Merata

Walaupun pihak dari Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai *workshop* untuk meningkatkan pemahaman tenaga pendidik dalam pelaksanaan SKTB serta standar dan tujuan yang sudah jelas, masih ada beberapa guru yang belum paham khususnya penyusunan RPP yang harus berkaitan dengan sistem remedial.

2. Pelaksanaan Remedial Tidak Sesuai Kebutuhan Individu Siswa

Sebagian guru melaksanakan remedial hanya sebagai formalitas tanpa benar- benar menyesuaikan kebutuhan siswa tiap individu, dimana remedial dilakukan dengan metode satu ukuran untuk semua padahal setiap siswa memeiliki ketertinggalan yang beda-beda.

3. Sosialisasi yang Tidak Merata

Walaupun sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah, namun belum merata dan masih terbatas kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Somba Opu. Sehingga menyebabkan masih kurangnya pemahaman dan juga masih adanya kesalahpahaman terkait maksud dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

4. Penurunan Semangat Belajar

Akibat pemahaman yang belum optimal terkait kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, memengaruhi motivasi belajar siswa yang mengalami penurunan, karena merasa tetap akan naik kelas meskipun belum mencapai kompetensi minimal.

D. Rekomendasi Kebijakan

1. Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis dilakukan secara berkala atau berkelanjutan, yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dalam memahami dan menerapkan SKTB, khususnya dalam penyusunan RPP, serta penyelenggaraan program remedial yang efektif. Bimtek rutin juga dapat sebagai sarana antar sekolah untuk berdiskusi mengenai kendala teknis yang dihadapi guru.

2. Menyusun Standar Remedial Bagi Guru yang Mencakup Beberapa Kebutuhan Siswa

Standar ini mencakup prosedur identifikasi kelemahan atau ketertinggalan belajar siswa, serta bentuk-bentuk remedial yang dapat disesuaikan dengan ketertinggalan siswa, serta standar evaluasi keberhasilan remedial.

3. Sosialisasi Dua Arah

Memperluas pemahaman siswa dan orang tua secara merata dengan mengadakan forum warga atau pertemuan RT/RW bersama guru dan kepala sekolah untuk membahas tujuan dan manfaat SKTB secara rutin. Juga sosialisasi melalui sosial media dengan menyebarkan pamflet, atau video pendek tentang SKTB melalui grup WhatsApp sekolah maupun media sosial sekolah.

E. Infografis





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendidikan merupakan proses yang panjang dalam kehidupan setiap individu untuk mengembangkan kapasitas diri, baik dalam hal kecerdasan, pengendalian diri, pembentukan akhlak mulia, hingga keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Nasution dkk., 2022). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menginisiasi kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dengan tujuan utama untuk memastikan semua peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, dengan memberikan pembelajaran remedial yang berkelanjutan bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan. Dengan kata lain, SKTB bertujuan untuk mencegah siswa tinggal kelas dan memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran.

Agar pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan ini berhasil dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti melakukan kegiatan bimbingan teknis, menyusun standar remedial bagi guru yang mencakup beberapa kebutuhan siswa, dan sosialisasi dua arah.

PENDAHULUAN



Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan merupakan pendekatan pendidikan yang berlandaskan pada prinsip pembelajaran tuntas dan berkesinambungan dengan proses belajar siswa tanpa hambatan administratif seperti tinggal kelas. Dalam sistem ini, seluruh siswa dipastikan naik kelas setiap tahun ajaran, dengan catatan bahwa sekolah wajib menyediakan program remedial bagi siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kebijakan SKTB dilaksanakan pada tahun 2013 disemua sekolah tingkatan SD dan SMP di Kabupaten Gowa. Hal tersebut, menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemerataan pendidikan.

Dalam rangka menciptakan pemerataan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dimana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan, tetapi juga pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menangani masalah pendidikan di daerah mereka.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Gowa mencapai 156.098 total penduduk, dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-15) tahun yang cukup besar, yaitu 23.000 anak. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan angka kelulusan tingkat SD dan SMP di Kecamatan Somba Opu mencapai hampir 100% pada tahun ajaran 2023/2024, yang tidak sejalan dengan capaian kemampuan literasi murid. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa 53,42% siswa SD dan 40% siswa SMP di Kecamatan Somba Opu berada di bawah level minimum dalam literasi membaca dan lebih dari 55% siswa tingkat SD dan SMP mengalami kesulitan dalam numerisasi dasar. Hal tersebut menunjukkan adanya GAP yang cukup besar antara presentasi kelulusan dengan capaian akademik riil siswa di Kecamatan Somba Opu.




DESKRIPSI MASALAH
1
PEMAHAMAN GURU TERHADAP TEKNIS PELAKSANAAN BELUM MERATA
Walaupun pihak dari Dinas Pendidikan telah melaksanakan berbagai workshop untuk meningkatkan pemahaman tenaga pendidik dalam pelaksanaan SKTB serta standar dan tujuan yang sudah jelas, masih ada beberapa guru yang belum paham khususnya penyusunan RPP yang harus berkaitan dengan sistem remedial.
2
PELAKSANAAN REMEDIAL TIDAK SESUAI KEBUTUHAN INDIVIDU SISWA
Sebagian guru melaksanakan remedial hanya sebagai formalitas tanpa benar- benar menyesuaikan kebutuhan siswa tiap individu, dimana remedial dilakukan dengan metode satu ukuran untuk semua padahal setiap siswa memeiliki ketertinggalan yang beda-beda.
3
SOSIALISASI YANG TIDAK MERATA
Walaupun sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan juga pihak sekolah, namun belum merata dan masih terbatas kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Somba Opu. Sehingga menyebabkan masih kurangnya pemahaman dan juga masih adanya kesalahpahaman terkait maksud dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan
4
PENURUNAN SEMANGAT BELAJAR
Akibat pemahaman yang belum optimal terkait kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, memengaruhi motivasi belajar siswa yang mengalami penurunan, karena merasa tetap akan naik kelas meskipun belum mencapai kompetensi minimal.


ALTERNATIF
KEBIJAKAN
1. Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis dilakukan secara berkala atau berkelanjutan, yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dalam memahami dan menerapkan SKTB, khususnya dalam penyusunan RPP, serta penyelenggaraan program remedial yang efektif. Bimtek rutin juga dapat sebagai sarana antar sekolah untuk berdiskusi mengenai kendala teknis yang dihadapi guru
2. Menyusun Standar Remedial Bagi Guru yang Mencakup Beberapa Kebutuhan Siswa
Standar ini mencakup prosedur identifikasi kelemahan atau ketertinggalan belajar siswa, serta bentuk-bentuk remedial yang dapat disesuaikan dengan ketertinggalan siswa, serta standar evaluasi keberhasilan remedial.
3. Sosialisasi Dua Arah
Memperluas pemahaman siswa dan orang tua secara merata dengan mengadakan forum warga atau pertemuan RT/RW bersama guru dan kepala sekolah untuk membahas tujuan dan manfaat SKTB secara rutin. Juga sosialisasi melalui sosial media dengan menyebarkanpamflet, atau video pendek tentang SKTB melalui grup WhatsApp sekolah maupun media sosial sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, Fauziah, Lili Yulia Anggraini, dan Khumairani Putri (2022). Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Dan Jenis-Jenis Sekolah Luar Biasa. Jurnal Edukasi Nonformal, 3 (2), 422–27.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.